

ABSTRAK

ACHMAD FAQIH (2018) NIM : MH.15.26.1824 Judul Tesis “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan *Good Governance*” program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Rendahnya kualitas pelayanan public dan birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, kolusif dan koruptif menuntut adanya perbaikan pelayanan birokrasi. Upaya perbaikan pelayanan birokrasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya menata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan memberikan pelayanan publik (*public services*) kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan Peraturan Daerah OPD tersebut masih mengalami beberapa kendala pada teknis pelaksanaannya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa efektif dan efisien penataan birokrasi dalam mendorong terwujudnya *good governance*, apakah Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, Apa hambatan dan solusinya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif agar dapat dihasilkan suatu pemahaman yang utuh.

Dari hasil kajian tesis ini dapat disimpulkan bahwa ada dua penyebab yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang OPD yakni faktor teknis yang menyangkut penempatan jabatan pada OPD yang baru dan faktor non-teknis yang berkaitan dengan “kebijakan politis” pemerintah.

Efektivitas kinerja birokrasi sebagai implikasi pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang OPD dipengaruhi oleh perubahan struktural yang mendasar pada organisasi perangkat daerah melalui penetapan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang OPD yang menggantikan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo. Dampaknya ialah mengurangi 268 / 37% jabatan struktural dengan rincian jabatan eselon yang total semula 728 menjadi menjadi 460 eselon.

Perampingan struktur dan demosi jabatan tentu berpengaruh pada peningkatan kualitas kinerja birokrasi dalam memberikan layanan publik yang lebih efektif, efisien didalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, maka konsep perampingan struktur dengan program penataan aparatur dan tata laksana birokrasi menjadi linier secara bersamaan.

Kata kunci : *Organisasi Perangkat Daerah– Good Governance*

ABSTRACT

ACHMAD FAQIH (2018) NIM: MH. 15.26.1824 Title Thesis "Implementation of Wonosobo District Regulation Number 3 of 2014 concerning Regional Device Organizations to realize Good Governance" Master of Law program in Sultan Agung Islamic University.

The low quality of public services and sluggish bureaucracy, convoluted, collusive and corrupt procedures demand an improvement in bureaucratic service. Efforts to improve bureaucratic services are carried out by the Regional Government of Wonosobo Regency through Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Regional Device Organizations in an effort to well with the aim of providing public services to the public effectively and efficiently. However, the implementation of the OPD Regional Regulation is still experiencing some obstacles to the technical implementation. The problem studied in this study is how effective and efficient the bureaucratic arrangement is in encouraging the realization of good governance, whether the Regional Regulation No. 3 of 2014 is able to create efficiency and effectiveness in the administration of government in Wonosobo District, What are the obstacles and solutions?

This type of research is qualitative research using a sociological juridical approach. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Then analyzed with qualitative analysis methods in order to produce a complete understanding.

From the results of this thesis study, it can be concluded that there are two causes that cause the implementation of Local Regulation to be hampered. 3 of 2014 concerning OPD namely technical factors concerning the placement of new OPD and non-technical factors related to the government's "political policy".

The effectiveness of bureaucratic performance as an implication of the implementation of Perda No. 3 of 2014 concerning OPD is influenced by fundamental structural changes in the regional apparatus organization through the stipulation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning OPD replacing Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning Wonosobo District Regional Government Affairs. The effect is to reduce 268/37% structural positions with details of echelon positions which totaled originally 728 to become 460 echelon.

Structural downsizing and demotion of position certainly have an effect on improving the quality of the performance of the bureaucracy in providing more effective, efficient public services in implementing broad, real and responsible regional autonomy authority. Thus, the concept of streamlining the structure with the apparatus structuring program and bureaucratic governance becomes linear simultaneously.

Keywords: Regional Device Organization - Good Governance